

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anger Sigit Pramukti dan Erdha Widayanto, 2015, *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Bambang Waliuyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Djambatan.
- _____, 2005, *Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya*, Jakarta: Djambatan.
- Iqbal Hasan, 2006, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ishaq, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta CV.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia.
- Moh. Yamin Lubis, Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: Mandar Maju.
- Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rianto Adi, 2015, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok: Rajawali Pers
- Rusmadi Murad, 1999, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung : Alumni.
- Sahnan, 2016, "*Hukum Agraria Indonesia*", Malang: Setara Press
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Supriadi, 2016, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Urip Santoso B, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenanda Group.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat dan Pemanfaatannya

C. Skripsi

Yozi Ardian, 2020, “Jual Beli Tanah Harta Pusaka Tinggi Yang Belum Bersertifikat Dan Pelaksanaan Pendaftarannya Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

D. Jurnal

Ery Agus Priyono, 2018, *Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi*, Law Development & Justice Review, Vol 1, No. 1

Ghina Ari, Edith Ratna, 2019, *Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu*, Notarius, Vol 12 Nomor. 2.

Indah Sari, 2020, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 11, No. 1

Nova Yarsina, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukittinggi*, Jurnal Cendikia Hukum: Vol 3

Tiarawati Poniskori, 2017, *Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Lex Privatum, Vol. V, No. 2.